

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Acamad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, Edisi Ketiga, Cet. Pertama 2005
- Atep Adya Barata, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Menghitung Objek Dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta
- Ade Maman, Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: kencana, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetak ketiga, Bandung: Citra Aditya, 2013
- Burhan Bungis., *"Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya"*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana
- Marihot Pahala Siahaan, 2005, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Teori Dan Praktek Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Menegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Sripudiyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Setu Setiawan, 2009, *Perpajakan Indonesia Edisi 2009*, UMM Press, Malang
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi pertama, Cetak kesatu, Rajawali Pers, Jakarta

- Jimly Ashidiqqie dan M. Ali Sa'ad, *Theory Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektifitas Undang-Undang Money laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2011
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Edisi ke 2, Bandung, Enresco, 1988
- Winarno Surachman, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**, LN No 44 tahun 1997, TLN No 3688
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang **Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**, LN No 130 tahun 2000, TLN No 3988
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1986 Tentang **Rumah Susun**
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Tentang **Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah**
- Peraturan Pemerintah 111 Tahun 2000 Tentang **Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**
- Peraturan Pemerintah 112 Tahun 2000 Tentang **Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan**

Peraturan Pemerintah 113 Tahun 2000 Tentang **Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang **Pendaftaran Tanah**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang **Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 Tentang **Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 Tentang **Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002 Tentang **Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;**

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang **Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ/1997 Tentang **Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/1997 Tentang **Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/1997 Tentang **Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar dan Perhitungan Kelebihan Pembayaran atas BPHTB.**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-221/PJ/2002 Tentang **Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 **Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

www.hukumpositif.com, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017, pukul 16.00

www.hukumpositif.com, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017, pukul 16.20